PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN DARUL MUJAWIDDIN BERDASARKAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN

Santya Dara Dinanti[1]
santyadaradinnati@gmail.com
[1] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Nur Fitriyah[2]
nurfitriyah@unram.ac.id
[2] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren Darul Mujawiddin yang belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif deskriptif** dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengelola keuangan pesantren dan pengurus yang terlibat dalam proses administrasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren yang diteliti masih menggunakan metode pencatatan keuangan yang sederhana dan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Banyak pesantren yang masih menggunakan buku kas manual tanpa pemisahan yang jelas antara dana terikat dan tidak terikat, serta tidak menyusun laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan aktivitas secara terstruktur. Beberapa kendala yang ditemukan adalah terbatasnya pengetahuan tentang akuntansi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta minimnya dukungan teknologi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini merekomendasikan agar pondok pesantren meningkatkan pemahaman akuntansi melalui pelatihan, mengadopsi sistem pencatatan yang lebih baik, serta memastikan adanya pendampingan dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren agar laporan keuangan yang disusun dapat memenuhi standar yang berlaku.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Kendala Implementasi, Pedoman Akuntansi Pesantren, Penyusunan Laporan Keuangan, Pondok Pesantren

ABSTRACT

This research aims to analyze and evaluate the preparation of financial reports at the Darul Mujawiddin Islamic boarding school which has not implemented the Islamic Boarding School Accounting Guidelines. This research uses a descriptive quantitative approach with data collection techniques through observation and documentation studies. Research subjects include Islamic boarding school financial managers and administrators involved in the financial administration process. The research results show that the Islamic boarding schools studied still use simple financial recording methods and have not prepared financial reports in accordance with the Islamic Boarding School Accounting Guidelines. Many Islamic boarding schools still use manual cash books without a clear separation between restricted and unrestricted funds, and do not prepare financial position reports, cash flow reports and activity reports in a structured manner. Some of the obstacles found were limited knowledge about accounting, lack of trained human resources, and minimal technological support for financial recording and reporting. This research recommends that Islamic boarding schools improve their understanding of accounting through training, adopt a better recording system, and ensure that there is assistance in implementing the Islamic Boarding School Accounting Guidelines so that the financial reports prepared can meet applicable standards.
Keywords: Accountability, Implementation Obstacles, Islamic Boarding School Accounting Guidelines, Preparation of Financial Reports, Islamic Boarding Schools

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendalami nilai-nilai keagamaan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren dalam hal ini dapat kita asumsikan sebagai sebuah entitas. Sebagaimana entitas, pasti memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai visi dan misi sebuah entitas diperlukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Terutama sebuah pondok pesantren yang besar, memerlukan pengelolaan yang baik dari berbagai aspek yang ada di pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi yang utama antara lain Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang secara khusus mengatur pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama islam dengan fungsi pendidikan,dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan sebagaibadan hukum yang sering digunakan untuk mendirikan pesantren; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang mana mengatur mekanisme pendanaan pesantren, termasuk dana operasional, program pembangunan, dan dukungan untuk kesejahteraan para santri dan tenaga pengajar.

Tuntutan terkait aspek keuangan menjadikan pesantren mengharuskan diri untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pesantren. Dengan demikian, setiap pesantren yang ada di Indonesia memiliki laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang dihasilkan oleh tiap-tiap pesantren memiliki bentuk kerangka yang berbeda meski memiliki tujuan yang sama. Hal ini menjadikan pengguna laporan keuangan kebingungan dalam membaca laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan tidak memiliki nilai banding sehingga pengguna laporan keuangan tidak bisa membandingkan kinerja pesantren dengan pesantren lainya meskipun mereka ada di bidang yang sama (Akuntansi et al., 2019).

Tuntutan terkait aspek keuangan menjadikan pesantren mengharuskan diri untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pesantren. Dengan demikian, setiap pesantren yang ada di Indonesia memiliki laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang dihasilkan oleh tiap-tiap pesantren memiliki bentuk kerangka yang berbeda meski memiliki tujuan yang sama. Hal ini menjadikan pengguna laporan keuangan kebingungan dalam membaca laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan tidak memiliki nilai banding sehingga pengguna laporan keuangan tidak bisa membandingkan kinerja pesantren dengan pesantren lainya meskipun mereka ada di bidang yang sama. Diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan di dalam pesantren. Maka dari itu Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar baru yang mengatur penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yaitu pedoman akuntansi pondok pesantren. Dengan adanya peraturan baru tersebut dapat menjadi suatu landasan bagi pondok pesantren untuk membenahi dan menyempurnakan laporan keuangan di dalam pesantren tersebut, agar laporan keuangan di dalam pesantren bisa lebih dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Serta laporan keuangan bagi Pondok Pesantren sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (IAI, 2018).

Di Indonesia berlaku 5 (lima) standard akuntansi yang juga sering disebut 5 pilar standard akuntansi yaitu, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan pedoman akuntansi pesantren adalah SAK ETAP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Pedoman Akuntansi Pesantren diterapkan untuk yayasan

pondok pesantren dan bukan pada badan usaha berupa badan hukum sendiri walaupun dimiliki oleh pondok pesantren (IAI dan BI, 2018: 2). Pedoman akuntansi pesantren juga digunakan oleh unit usaha milik pesantren yang dikelola secara mandiri dan termasuk dalam bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha demikian termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren. Sedangkan unit usaha dari pondok pesantren yang berdiri sendiri sebagai badan hukum terpisah tidak termasuk kedalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren. Unit usaha milik pesantren yang berbadan hukum terpisah dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan SAK ETAP.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standard akuntansi keuangan yang dibuat untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (IAI, 2016; 1). Tetapi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP sesuai dengan SAK ETAP. Filosof yang diinginkan oleh standar akuntansi yaitu filosofi kejujuran (Integrity Philosophy) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang rasional dan filosof yang kedua yaitu filosofi transparansi yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap entitas yang menyusun laporan.

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen, serta menjadi alat pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan. Menurut Fidiana (2017) pengakuan peran penting pesantren dalam memberdayakan ekonomi umat merupakan pengakuan strategis akan eksistensi pesantren sebagai bagian dari lokomotif pesantren. Kemajuan pesantren tidak hanya dinilai dari bidang pendidikan islami yang diberikan, namun pondok pesantren dapat dikatakan maju jika memenuhi karakteristik pada kualitas laporan keuangan yang baik. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset kewajiban, aset bersih, dan hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Sumber daya yang diterima disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Kemampuan dalam proses mencatat dan melaporkan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dari seluruh stakeholder yang secara jangka panjang dapat mendukung pengembangan pesantren. Pedoman Akuntansi Pesantren membantu menyempurnakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk Pondok Pesantren.

Arifin (2014) Menjelaskan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pondok pesantren harusnya ada keterbukaan sumber keuangan beserta jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas supaya memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Dengan penyusuanan laporan keuangan yang sesuia dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dapat menjadi gambaran bagi masyarakat bagiamana manajemen di dalam Pesantren serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan di dalam pesantren, dimana peran masyarakat sangat penting untuk kemajuan bagi sebuah pondok Pesantren.

Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah sebagai berikut. Penelitian oleh Zainal Arifin (2014) tentang pertanggung jawaban laporan keuangan di yayasan yang menyatakan bahwa laporan keuangan di yayasan Nazhatut thullab belum sesuai dengan pedoman akuntansi, dan belum diklasifikasi sesuai dengan standar akuntansi. Begitu juga dengan Mohammad fatih (2015) tentang implemetasi PSAK 45 yayasan pesantren yang mengatakan bahwa laporan keuangan di pesantren tersebut hanya terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar, dan belum sesuai dengan PSAK 45. Farih (2015) dalam penelitiannya tentang peyusunan laporan keuangan dalam perspektif PSAK 45

di yayasan pesantren menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan hanya sebatas pada penerimaan dan pengeluran kas serta jumlah aset yang dimiliki , belum sesuai dengan perspektif PSAK 45. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Himmatun Ayat yang menunjukkan bahwa PSAK 45 belum bisa diterapkan karena adanya kendala sumber daya manusia yang masih dalam proses pemahaman tentang laporan keuangan (Bestari, 2015). Dilihat dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar pondok pesantren belum dapat menerapkan PSAK 45, karena penyusunan laporan keuangan yang hanya terbatas pada pencatatan dana masuk dan keluar serta aset yang dimiliki sudah dirasa cukup (Fatih, 2015).

Objek penelitian ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren Darul Mujawiddin yang berada di Jempong. Pondok Pesantren Darul Mujawiddin ini beraktivitas di bidang non formal seperti taman pendidikan Qur'an (TPQ). Pondok Pesantren ini beralamat di Jl.Kali Baru Gg.Alam Sari III Tinggar Perluasan, Ampenan, Lombok. Selama perkembangan Pondok Pesantren Darul Mujawiddin berlangsung juga mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan yang diakibatkan karena ketidakpahaman mengenai cara menyusun laporan keuangan yang benar menurut standar akuntansi berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Kondisi aktual yang ada di Pondok Pesantren Darul Mujawiddin hanya pada arus kas dana masuk dan keluar. Metode laporan keuangan yang digunakan oleh pondok pesantren ternyata belum cukup memberikan informasi terhadap laporan keuangan apakah mengalami kerugian atau keuntungan. Lembaga ini tidak berorientasi pada laba namun penting adanya informasi yang menggambarkan kinerja keuangan pondok pesantren. Klasifikasi atas pendapatan, beban, dan aktiva bersih tidak disajikan dalam l laporan keuangan pondok pesantren, selain itu sering terjadi piutang tak tertagih yang diakibatkan oleh santri yang telat membayar hingga masa mondok selesai. Mengingat Pondok Pesantren ini terus berjalan dan berkembang dengan baik maka diperlukan laporan keuangan yang penyusunannya memiliki dasar. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti tentang Implementasi pencatatan akuntansi berdasarkan PAP di pesantren yang mana pada kasus ini penulis memilih Pondok Pesantren Darul Mujawiddin. Peneliti menginginkan pondok pesantren Darul Mujawiddin dapat melakukan prosedur pencatatan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren agar menjadikan suatu sistem informasi akuntansi sederhana yang baik dan sesuai dengan kaidah Akuntansi.

TINJAUAN LITERATUR

Landasan Teori

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-kosnep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answeraility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan; dan penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Adapun implikasi teori akuntabilitas dalam penelitian ini yatu teori akuntabilitas membantu menjelaskan dan menilai bagaimana pondok pesantren bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan kepada pemangku kepentinganmya. Teori akuntabilitas memberikan landasan konseptual yang kuat dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Dengan mematuhi Pedoman Akuntansi Pesantren, pesantren dapat memenuhi kewajiban mereka terhadap transparansi, tanggung jawab, dan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini tdak hanya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap peran pesantren dalam masyarakat.

Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan islam yang menampung sejumlah santri maupun santriwati dalam rangka mempelajari ilmu ilmu agama dibawah bimbingan seorang kyai (Herman, 2013). Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang memiliki sistem asramaatau pondok. Di pondok pesantren kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan, dan pengajaran islam dibawah bimbingan kyai. Kyai dan santri membentuk komunitas pengajar dan belajar, yaitu asrama. Setiap pesantren pasti memiliki ciri pesantren bersifat ciri dan penanaman tersendiri, namun hal tersebut tidak berarti bahwa lembaga pesantren benar-benar berbeda. Pondok pesantren satu dengan yang lain masih terdapat persamaan yang saling terkait, yaitu sistem yang digunakan suatu pesantren juga diterapkan dipesantren lain (Afif, 2017).

Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren

Pondok pesantren merupakan suatu organisasi non profit atau kegiatannya tidak berorientasi mencari laba atau keuntungan. Namun di dalam pondok pesantren harus tetap dan perlu dibuat laporan keuangan untuk dana-dana yang biasanya berasal dari donasi atau sumbangan para anggota dan masyarakat. Selain itu pentingnya pembuatan laporan keuangan adalah untuk informasi kepada para donator dan penyumbang tentang kemana dan bagaimana dana dari mereka dikelola dan digunakan oleh pondok pesantren. Dengan kata lain donator membutuhkan transparansi atas donasi yang telah diberikan. Didalam Pedoman Akuntansi Pesantren (2018) dijelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhui kepentingan para penyumbang , kreditur, dan pihak lain yang menyedikan sumber daya bagi pondok pesantren dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang telah diamanahkan. Oleh karena itu laporan keuangan harus dibuat serinci mungkin untuk memberikan informasi kepada para penggunanya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Manfaatnya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Menurut Zamroni (2015) melakukan penelitian dengan judul Penyusunan laporan keuangan dalam perspektif PSAK No.45 di Yayasan Darul Mustaghitsin . Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, memperoleh hasil bahwa Yayasan pesantren Darul

Mustaghitsin telah menyusun laporan keuangan, namun hanya sebatas pada penerimaan dan pengeluaran kas, serta jumlah aset yang dimiliki. Penyusunan laporan keuangan Yayasan pesantren Darul Mustaghitsin belum sesuai dengan perspektif PSAK No.45.

Fatih (2015) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penyusuan Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Yayasan Berdasarkan PSAK NO.45 Pada Pesantren Tabbiyatul Arifin. Peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan memperoleh hasil bahwa Pesantren Tabbiyatul Arifin hanya menyusun laporan keuangan sebatas hanya pada penerimaan dan pengeluran kas dan jumlah aset yang dimiliki belum sesuai dengan PSAK 4 5.

Menurut Afif (2017) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada Pesantren Luhur Al Husna Surabaya). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, memperoleh hasil bahwa Pondok Pesantren Luhur Al Husna menggunakan sistem *Top Down* , pimpinan pesantren lebih aktif dalam pengelolaan keuanganpesantren. Pengasuh pesantren merupakan otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan. Laporan keuangan belum dibuat per bulan dan belum menerapkan PSAK No.45

Kerangka Pikiran

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi. Penyusunan laporan keuangan organisasi memiliki standar yang berbeda, termasuk pondok pesantren. Berlaku mulai Bulan Mei Tahun 2018, IAI mengeluarkan standar baru mengenai penyusunan laporan keuangan pondok pesantren, yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren. Kondisi aktual dilapangan menyebutkan bahwa masih banyak lembaga organisasi, khususnya pondok pesantren yang masih belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Alasan tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan di pondok pesantren. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperbaiki laporan keuangan pondok pesantren agar sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, serta memberikan contoh dimasa depan agar pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren secara mandiri.

Berikut merupakan kerangka pikiran dari penelitian yang akan dilakukan di Pondok Pesantren Darul Mujawiddin:

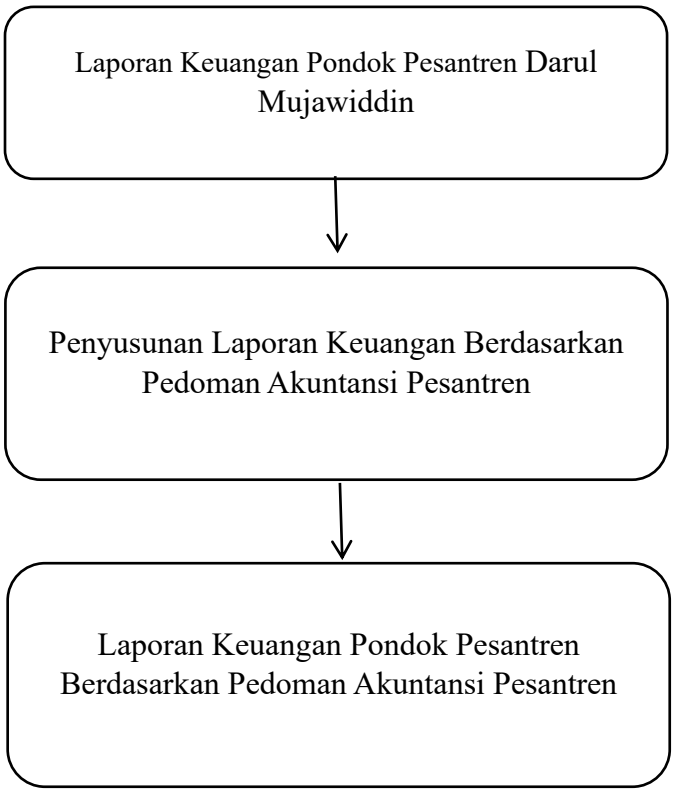

Gambar 1. Kerangka Pikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, deskriptif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel social (Nur Fitriyah et al., 2021). Deskriptif menganalisis data secara sistematik. Analisis yang digunakan analisis persentase dan analisis kecenderungan (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020) .Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifatinduktif, objek dan ilmiah dimana data yang diperoleh dalam bentuk angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat dinilai dan dianalisis Penelitian dengan pendekatan kuantitatif biasanya dilakukan dengan jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan populasi yang ada. Perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu. Pemilihan rumus yang digunakan, kemudian disesuaikan dengan jenis penelitian dan populasi (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Mujawiddinyang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian diperkirakan selama 1 bulan.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan karakteritik masalah yang sangat berhubungan dengan latar belakang dan suatu kondisi pada objek yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang aktivitas transaksi yang terjadi di Yayasan

Pondok Pesantren Darul Mujawiddin, yang mana bertujuan agar dapat mengidentifikasi kegiatan yang terjadi, yang nantinya akan disusun laporan keuangan dari hasil identifikasi tersebut sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data observasi dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Obse rvasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yang mana dokumen-dokumen tersebut merupakan kumpulan data yang sudah didokumentasikan oleh pondok pesantren yang berhubungan dengan laporan keuangan pondok pesantren.

Analisi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dimana data-data yang didapat dianalisis secara kuantitatif. Analisis yang digunakan dengan cara menelaah, menjelaskan dan mengkaji semua data yang didapat dari hasil observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Selama ini, laporan keuangan yang disusun Pondok Pesantren Darul Mujawiddin Tinggar hanya selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Akuntabilitas juga penting diterapkan di pondok pesantren disamping penyusunan keuangan yang sesuai standar. Menurut Mardiasmo (2009), "Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memilki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Laporan keuangan yang dibuat hanya cukup dilaporkan kepada pengasuh. Akan tetapi, ada hal penting yang perlu diperbaiki pada system pelaporan keuangan pondok pesantren yaitu sistem penyusunan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren supaya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Untuk membuat penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, maka diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data
   a. Mengidentifikasi transaksi-transaksi yang ada di Pondok Pesantren Darul Mujawiddin
   b. Mengidentifikasi catatan-catatan keuangan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Mujawiddin.
2. Penyajian Data
   a. Menyusun kode rekening dan daftar nama akun.
   b. Memasukan data-data keuangan Pondok Pesantren Darul Mujawiddin.
   c. Menyusun laporan keuangan Pondok Pesantren Darul Mujawiddin.
3. Kesimpulan
   a. Sesuai atau tidaknya laporan keuangan Pondok Pesantren Darul Mujawiddin dengan Pedoman Akuntansi Pesantren

Berdasarkan beberapa tahapan di atas, maka ada beberapa data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan ini yang diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Wawancara yang dilakukan yaitu dengan pengurus bendahara pondok pesantren. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui aktivitas transaksi yang terjadi pada Pondok Pesantren Darul Mujawiddin. Selain itu, untuk menggali informasi yang dibutuhkan mengenai akuntansi aset, liabilitas dan aset neto.
2) Observasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat secara langsung aktivitas apa yang terjadi, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan atau tidak.

3) Dokumentasi yang diperlukan yaitu mengenai laporan keuangan yang disusun oleh Pondok Pesantren Darul Mujawiddin baik itu bulanan dan tahunan 2022. Hal ini sebagai dasar penyesuaian laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Berikut adalah penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung tahun 2022 berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren:

1. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.8
Laporan Posisi Keuangan
YAYASAN PONDOK PESANTREN
Per 31 Desember 2022

		2022
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	Rp	124.737.000
Perlengkapan	Rp	22.370.000
Jumlah	**Rp**	**147.107.000**
Aset Tidak Lancar		
Tanah	Rp	101.500.000
Bangunan	Rp	171.000.000
Akumulasi penyusutan bangunan	-Rp	6.650.000
Peralatan	Rp	73.500.000
Akumulasi penyusutan peralatan	-Rp	16.575.000
Investasi pada entitas lain		0
Properti investasi		0
Jumlah	**Rp**	**322.775.000**
Aset lain-lain (persediaan bahan bangunan)	Rp	3.200.000
Total Aset	**Rp**	**473.082.000**
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek		0
Pendapatan diterima dimuka		
Utang jangka pendek		
Liabilitas jangka pendek lainnya		
Jumlah		0
Liabilitas jangka panjang		0
Total Liabilitas		0
ASET NETO		
Aset neto tdak terikat	Rp	473.082.000
Aset neto terikat temporer		0
Aset neto terikat permanen		0
Total Aset Neto	**Rp**	**473.082.000**
Total Liabilitas dan Aset Neto	**Rp**	**473.082.000**

Sumber: (Data Olahan Penulis)

2. Laporan Aktivitas

Tabel 4.9 Laporan Posisi Keuangan YAYASAN PONDOK PESANTREN Per 31 Desember 2022		
		2022
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		
Penghasilan Tidak Terikat		
Aset Neto Tidak Terikat - Sumbangan	Rp	6.350.000
Aset Neto Tidak Terikat - Infaq	Rp	987.587.000
Aset Neto Tidak Terikat - Kontribuisi Santri	Rp	23.000.000
Jumlah	**Rp**	**1.016.937.000**
Beban Tidak Terikat		
Beban Gaji	Rp	9.600.000
Beban Listrik	Rp	-
Beban Iklan	Rp	3.792.000
Beban Konsumsi	Rp	797.650.000
Beban Transportasi	Rp	970.000
Beban Upah Tukang	Rp	5.900.000
Jumlah	**Rp**	**817.912.000**
Kenaikan (Penurunan)	**Rp**	**199.025.000**
Saldo Awal		
Saldo Akhir		
PERUBAHAN ASET NETO TIAK TERIKAT TEMPORER		
Program A		
Pendapatan		
Beban		
Surplus		
Aset neto terikat temporer yang berakhir		
Kenai (Penurunan)		
Saldo Awal		
Saldo Akhir		
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN		
Wakaf uang		
Wakaf harta bergerak selain uang		
Wakaf harta tidak bergerak		
Hasil bersih pengelolahan dan pengembangan wakaf		
Alokasi hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf		
Kenaikan (Penurunan)	**Rp**	**199.025.000**
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	**Rp**	**322.775.000**
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	**Rp**	**473.082.000**
Sumber: (Data Olahan Penulis)		

3. Laporan Arus Kas

Tabel 4.12
Laporan Posisi Keuangan
YAYASAN PONDOK PESANTREN
Per 31 Desember 2022

	2022
ARUS KAS OPERASI	
Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi	
Perubahan aset neto	Rp 199.025.000
Penyesuaian:	
Kas dari Santri	Rp 23.000.000
Kas yang dibayarkan untuk beban	-Rp 817.912.000
Kas dari Sumbangan, infaq dan wakaf	Rp 993.937.000
Jumlah kas neto diterima dari aktivas	**Rp398.050.000**
ARUS KAS INVESTASI	
Pembelian perlengkapan	-Rp 22.370.000
Pembelian peralatan	-Rp 73.500.000
Pembelian aset lain-lain (persediaan bahan	-Rp 3.200.000
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas	**-Rp 99.070.000**
ARUS KAS PENDANAAN	
Pembayaran utang jangka panjang	Rp 298.980.000
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas	0
Kenaikan (Penurunan)	
Saldo Awal	**Rp174.243.000**
Saldo Akhir	**Rp124.737.000**
Sumber: (Data Olahan Penulis)	

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Darul Mujawiddin Tinggar, dimana penulis telah melakukan penjurnalan dari setiap transaksi yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Mujawiddin Tinggar selama tahun 2022, membuat neraca saldo sampai dengan menyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yang terdapat empat laporan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pencatatan keuangan di Pondok Pesantren Darul Mujawiddin Tinggar masih menggunakan pencatatan yang sederhana. Pencatatan yang dilakukan hanya berupa pemasukan dan pengeluaran kas sehingga Pondok Pesantren belum mengidentifikasi laporannya sesuai dengan Pedoman Akutansi Pesantren, dimana pedoman ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia agar memudahkan Pondok Pesantren dalam menyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum di Indonesia dan dapat dijadikan nilai tambah bagi kemajuan Pondok Pesantren Darul Mujawiddin sendiri.

REFERENSI

Afif, R.F. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan (Studi Kasus pada Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya)*. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Arifin, Zainal. 2014. *Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren Studi pada Yayasan Nazhatut Thullab, Skripsi.* Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya

Aldiansyah & Linda Lambey. 2017. *Penerapan PSAK N0.45 Revisi Tahun 2015 pada Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu. Jurnal Accountability.* Hal 101

Arifin, Zainal. 2014. Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studipada Yayasan Nazhatut Thullab. *Jurnal ilmu & Riset Akuntansi*

Bahri, Syaiful. (2016). *Pengantar Akuntansi: Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Yogyakarta*: ANDI, Anggota IKAPI.

Bestari, Teguh Kristanti Laksmi. 2015. *Penerapakan PSAK 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Himmatun Ayat Surabaya.* Jurnal Ilmu & Riset

Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik,* Cet. 1, (Yogyakarta: Caps, 2014), hlm. 181

Dwi Martani., dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK,* Cet. 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 54

Fatih. Mohammad. 2015. *Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Yayasan Berdasarkan PSAK 45. (Studi Kasus pada Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Kecamatan PakisKabupaten Malang). Skripsi* . Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Fidiana. 2017. *Rekonstruksi Laporan Keuangan Entitas Pendidikan Islami Berbasis PSAK No. 45.* Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: PT. GrafindoPersada

Hayim, H Farid. 1998. *Visi Misi Pondok Pesantren dalam pengembangan SDM: Studi kasus pada Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam*

Herman, DM.2013. *Sejarah Pesantren di Indonesia*. *Jurnal Al-Ta'dib* Vol 6. No.2Halm 146

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) 2018. *Pedoman Akuntansi Pesantren* . Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)* . Jakarta: Dewan standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2016).*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Per 2017.* Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).2012. *Standar Akuntansi Keuangan.*Jakarta: Salemba Empat

Mulya, Hadri. 2013. *Memahami Akuntansi Dasar.* Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Akuntansi, I., Sebagai, P., Pelaporan, A., Organisasi, K., Basyir, R., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ibrahim, M. M. (2019). *IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN SEBAGAI BENTUK AKUNTANBILITAS PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Batu)*.

Nur Fitriyah, Herlina Pusparini, & Nurabiah, N. (2021). Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, *20*(1), 33–45. https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.123

Pedoman Akuntansi Pesantren. Jakarta: Bank Indonesia, 2018.

Zamroni, Moh Fatih. (2015). *Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Perspektif PS AK Nomor 45 di Yayasan Darul Mustaghitsin, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.